

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dikenal dengan Negara yang tingkat populasinya sangat tinggi. Pada tanggal 17 Juni tahun 2019, *Pew Research Center* mengeluarkan data bahwa Indonesia berada di urutan keempat dengan jumlah jiwa terbanyak sejumlah 274 jiwa. Tahun 2020 Badan Pusat Statistik menyebutkan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 269,7 Juta jiwa.

Dengan data jumlah penduduk tersebut, dapat dikatakan bahwa tantangan baru dalam menghadapi bonus demografi untuk menciptakan lapangan pekerjaan, membangun kualitas hidup masyarakat, sarana dan pra sarana, meningkatkan ketersediaan infrastruktur, dan terciptanya pembangunan kualitas sumberdaya manusia.

Kualitas suatu Negara dilihat dari sumberdaya manusia yang berkualitas juga, dalam artian bahwa pentingnya pembangunan yang berkualitas akan sumberdaya manusia merupakan sebuah proyeksi Indonesia dalam menyambut Bonus Demografi dalam mewujudkan Indonesia maju, atau Indonesia Emas di tahun 2045 tetapi fenomena besarnya jumlah kependudukan Indonesia dapat berupa peluang bahkan hanya akan menjadi sebuah bencana demografi, Oleh karenanya pemerintah Indonesia membuat program prioritas nasional pembangunan terkait salah satunya adalah masalah kependudukan.

Dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 disebutkan bahwa pemerintah berusaha untuk mewujudkan Pembangunan Kependudukan dan Keluarga sebagai dasar

pelaksanaan program Kependudukan dan Keluarga Berencana yang menekankan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tidak terbatas pada masalah keluarga berencana dan keluarga sejahtera, tetapi juga masalah pengendalian kependudukan dan pembangunan yang berkualitas.

BKKBN sendiri diberikan tugas berupa untuk melaksanakan agenda prioritas pembangunan. Hal tersebut seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pembagian urusan pemerintahan kongkuren antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Sebagaimana yang telah ditegaskan bahwa pemerintah harus fokus pada empat bidang tertentu untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, yaitu sub urusan keluarga sejahtera, sub urusan pengendalian penduduk, sub urusan keluarga berencana dan sub urusan standarisasi dan sertifikasi.

Era bonus demografi yang dihadapi oleh Indonesia sekarang ini menjadi problematika yang harus di realisasikan, dimana bertambahnya jumlah penduduk usia produktif yang lebih besar dibandingkan jumlah penduduk yang tidak produktif. Dalam artian, hal tersebut didasari pada penambahan jumlah populasi manusia yang dikategorikan pada beberapa kelompok. Rentan usia dari 15-65 tahun dikategorikan pada usia yang produktif dengan mencapai 68% atau sekitar 185,22 juta jiwa dari total populasi. Untuk kelompok usia yang belum produktif dengan jumlah populasi manusia sebesar 66,05 juta jiwa atau 24,5% dengan rentan usia 0-14 tahun, serta untuk kelompok usia yang tidak produktif sebanyak 18,06 juta jiwa atau 6,7% dari total populasi yaitu diatas usia 65 tahun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa angka ketergantungan penduduk di Indonesia sebesar 45%.

Berdasarkan angka prevalensi data BKKBN tentang pengembangan solusi dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia melalui program GenRe yang berlandaskan pada program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja atau PKBR, yang dari pelaksanaan pembinaan di usia remaja dengan membentuk sebuah pusat informasi yang bertujuan untuk membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, seperti PIK-R atau Pusat Informasi Konseling Remaja untuk kalangan remaja dan untuk Pusat Informasi Konseling Masyarakat atau PIK-M pada kalangan masyarakat dengan target remaja yang berusia 10-24 Tahun dan belum menikah dan pembinaan kepada keluarga yang memiliki anak remaja melalui pembentukan BKR atau kelompok Bina Keluarga Remaja yang bertujuan untuk terciptanya Tegar Remaja dalam rangka Tegar Keluarga sebagai dasar tujuan untuk mewujudkan pembangunan kehidupan keluarga yang berkualitas.

Remaja yang memiliki perilaku yang sehat, terhindar dari resiko masalah kesehatan reproduksi remaja TRIAD KRR (seksualitas, napza, HIV dan AIDZ), mempunyai perencanaan kehidupan berkeluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera dan berkualitas serta menunda usia pernikahan merupakan salah satu dari filosofi dari Tegar Remaja itu sendiri.

Dalam mewujudkan amanat undang-undang dan menindak lanjuti masalah kependudukan serta memanfaatkan potensi usia remaja. Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional mengembangkan sebuah program Keluarga Berencana yang berfokus pada keluarga dan remaja, yang dimana tugas pokok serta fungsinya dikerjakan oleh Direktorat Bina Ketahanan Remaja atau Dithanrem. Program ini sendiri

berlandaskan pada peraturan Kepala Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional No 47/HK.010/B5/2010 mengenai Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2010 - 2014 dan Addendum Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 133/PER/B1/2011 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Tahun 2010- 2014 untuk Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana.

GenRe (Generasi Berencana) merupakan program yang berupaya pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN dalam mengatasi permasalahan kependudukan dengan sasaran pembangunan melalui usia remaja yang diaman menurut WHO (*World Health Organization*) bahwa usia remaja batasnya dari usia 10-19 tahun serta menurut BKKBN 10-24 Tahun, namun untuk Batasan usia remaja yaitu 10-18 tahun menurut peraturan Menteri Kesehatan No 25 Tahun 2014.

Tujuan dari program Generasi Berencana ini yaitu bertujuan untuk mengarahkan remaja untuk melaksanakan dan memahami bagaimana cara menyiapkan kehidupan berkeluarga, Melalui pemahaman program PKBR yang merupakan program landasan dari (GenRe) dengan tujuan agar remaja bisa memahami, belajar, memahami, dan mempraktekan pola hidup bersih (PHBS) dan sehat serta menghindari masalah-masalah remaja agar terhindar dari Seksualitas, Napza, Hiv dan Aids atau tiga masalah kesehatan reproduksi remaja. Dalam program GenRe inipun remaja diharapkan mampu untuk mendapatkan pengetahuan mengenai Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dalam menciptakan keluarga kecil sejahtera yang berkualitas.

Kota Gorontalo sebagai ibukota Provinsi Gorontalo menjadi sorotan utama dalam perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Hal ini tentu saja sejalan dengan pembentukan perangkat daerah dan pengendalian penduduk KB jelas terpampang di Peraturan Walikota No. 35 Tahun 2016 Tentang Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gorontalo. Dalam penerapan Kebijakan Program GenRe di Provinsi Gorontalo BKKBN Provinsi Gorontalo dengan Forum GenRe Indonesia Gorontalo berusaha melaksanakan pembentukan kelompok Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) dan Kelompok BKR (Bina Keluarga Remaja) Se-Provinsi Gorontalo.

Jumlah Kelompok PIK-R dan BKR yang telah terbentuk sebanyak 184 Kelompok PIK-R dan 126 Kelompok BKR Se-Provinsi Gorontalo, Diwilayah Kota Gorontalo tercatat sudah memiliki kelompok PIK-R sebanyak 46 Kelompok, dan 126 Kelompok BKR yang terbagi di seluruh kecamatan, Kecamatan Duingingi menjadi kecamatan dengan jumlah PIK-R terendah dengan hanya terbentuknya 3 Kelompok PIK-R dan 4 Kelompok BKR.

Kurangnya Jumlah kelompok PIK-R dan BKR di Kecamatan Duingingi dapat menggambarkan perlu adanya penilaian atau evaluasi dalam menentukan efektivitasnya pelaksanaan program GenRe di wilayah tersebut. Hal ini dapat mempengaruhi pembangunan kualitas sumber daya manusia terkhusus anak di usia remaja serta untuk meminimalisasi permasalahan yang ada di Kecamatan Duingingi.

Tabel 1.1 Data Kelompok PIK-R di Kota Gorontalo

KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	JUMLAH KELOMPOK
Kota Gorontalo	Kota Barat	8
	Kota Selatan	11
	Kota Utara	5
	Dungingi	3
	Kota Timur	5
	Kota Tengah	7
	Sipatana	5
	Dumbo Raya	1
	Hulonthalangi	1
TOTAL JUMLAH KELOMPOK : 46		

Sumber : Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo Tahun 2021

Tabel 1.2 Data Kelompok BKR di Kota Gorontalo

KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	JUMLAH KELOMPOK
Kota Gorontalo	Kota Barat	5
	Kota Selatan	4
	Kota Utara	4
	Dungingi	4
	Kota Timur	4

	Kota Tengah	4
	Sipatana	2
	Dumbo Raya	3
	Hulonthalangi	2
TOTAL JUMLAH KELOMPOK : 32		

Sumber : Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo Tahun 2021

Berdasarkan hasil dari tabel 1.1 dan 1.2 dapat dikatakan bahwa banyak remaja yang masih belum terdampak langsung dari pengimplentasian kebijakan Program GenRe di Kecamatan Duingi, hal ini pun menjadikan kasus pernikahan di usia anak masih relatif tinggi di tiga tahun terakhir.

Tabel 1.3 Data Pernikahan di Usia Anak di Kecamaran Duingi dalam tiga tahun terakhir.

NO	TAHUN	KELURAHAN	JUMLAH
1	2019	Huangobotu	25
		Libuo	10
		Tomulabutao	4
		Tuladenggi	8
		Tomulabutao Selatan	9
	JUMLAH		56
2	2020	Huangobotu	29
		Libuo	21
		Tomulabutao	13

		Tuladenggi	4
		Tomulabutao Selatan	10
		JUMLAH	77
3	2021	Huangobotu	15
		Libuo	5
		Tomulabutao	5
		Tuladenggi	14
		Tomulabutao Selatan	18
		JUMLAH	57

Sumber : KUA Kecamatan Duingingi tahun 2021

Tentunya berdasarkan data tabel 1.3 diatas dapat mempengaruhi upaya pemerintah dalam melaksanakan pembagunan keluarga berkualitas di Provinsi Gorontalo dan upaya untuk mewujudkan tujuan dari program GenRe pun terkait dengan Triad KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja) tidak dapat terlaksana dengan baik, Sehingga pada realitasnya remaja di Kecamatan Duingingi banyak yang masih terjerat kasus kenakalan remaja.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dilapangan dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, yaitu seperti kurangnya optimalisasi kegiatan yang berfokus pada keluarga berencana yang bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat terkhusus pada remaja yang belum sama sekali memahami tentang program keluarga berencana itu sendiri. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia berdampak kepada kelompok yang kinerja dibawah. Kurangnya

pendekatan yang dilakukan oleh aparatur desa menjadikan turunnya kebijakan yang di implementasikan belum terealisasi kepada masyarakat serta kurangnya kebijakan yang strategis dan realistis yang diaplikasikan pada masyarakat membuat kurangnya optimum dalam pemantauan dan evaluasi di setiap kebijakan yang dilaksanakan.

Kasus permasalahan yang dihadapi di atas menjadi fokus pemerintah dalam menghadapi bonus demografi, hal tersebut menarik untuk dijadikan sebagai penelitian yang berjudul “Efektivitas Program Generasi Berencana dalam Pembangunan Keluarga Berkualitas di Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo”.

1.2 Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian di atas fokus penelitian sebagai berikut :

1. Efektivitas Kebijakan Program Generasi Berencana di Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo, dengan subfokus :
 - a) Bagaimana pelaksanaan program Generasi Berencana di Kecamatan Dungingi?
 - b) Bagaimana evaluasi program Generasi Berencana di Kecamatan Dungingi?
2. Faktor yang mempengaruhi Efektivitas Kebijakan Program Generasi Berencana di Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo, dengan subfokus:
 - a) Bagaimana karakteristik organisasi program Generasi Berencana di Kecamatan Dungingi?
 - b) Bagaimana karakteristik teknologi program Generasi Berencana di Kecamatan Dungingi?
 - c) Bagaimana karakteristik lingkungan program Generasi Berencana di Kecamatan Dungingi?

- d) Bagaimana karakteristik pekerja yang menjalankan program Generasi Berencana di Kecamatan Duingi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitasnya kebijakan program GenRe (Generasi Berencana) di Kecamatan Duingi Kota Gorontalo.
2. Tujuan penelitian ini juga untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya kebijakan program GenRe (Generasi Berencana) di Kecamatan Duingi Kota Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi mahasiswa memperoleh pengetahuan dan bagaimana implementasi program Pamsimas terhadap upaya pengentasan kemiskinan.
2. Menjadi bahan kajian ilmiah serta pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada ilmu Administrasi Publik

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan serta memahami teori – teori yang diterima selama masa kuliah dan aplikasinya dalam melihat efektivitas suatu kebijakan
2. Bagi Institusi bisa bermanfaat sebagai perbandingan jika dilakukan penelitian serupa di Institusi yang bersangkutan serta pengelola kelompok PIK-R, BKR, serta BKKBN untuk memaksimalkan terlaksananya program sebaik mungkin.